



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

# AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



**1**

Infrastruktur TIK, Persidangan  
Jarak Jauh dan Streaming  
Persidangan Mahkamah Konstitusi

**2**

Sistem Informasi Penanganan  
Perkara Elektronik  
([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id))

**3**

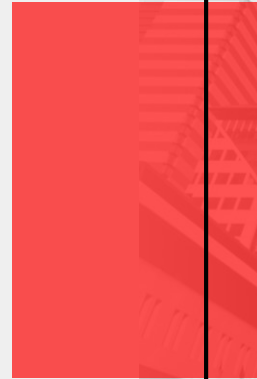
Website Mahkamah Konstitusi,  
Case Tracking dan Case Retrieval

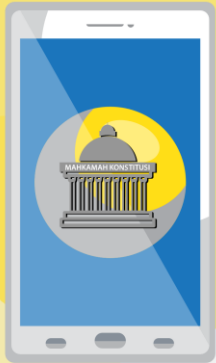
**4**

Click MK

# PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

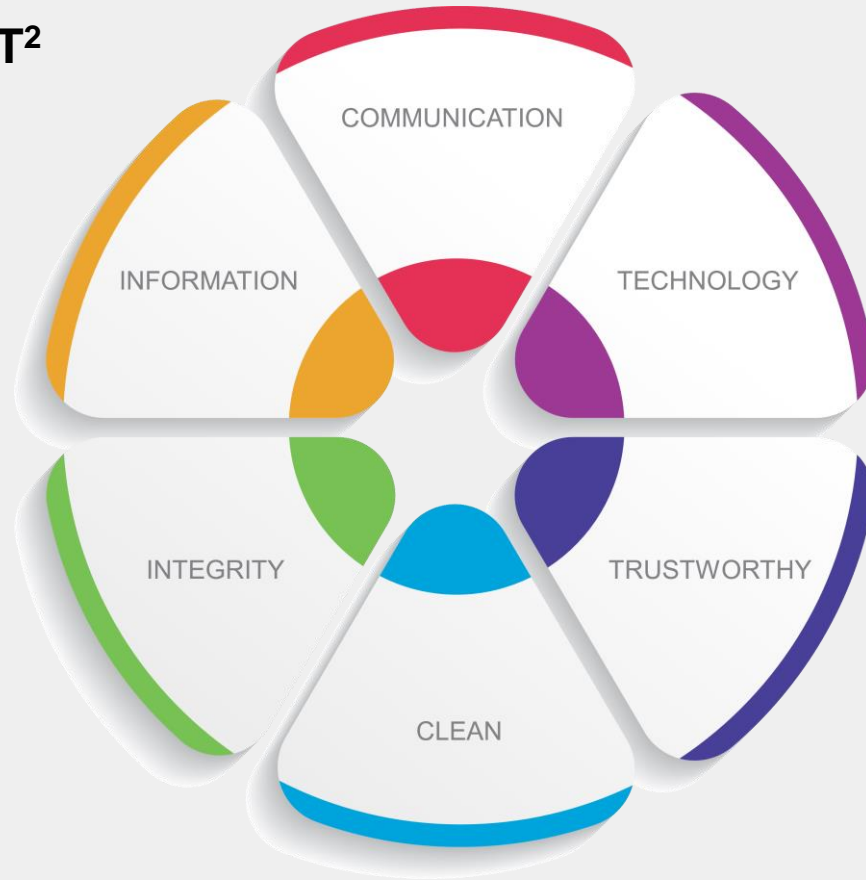




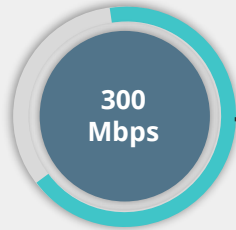
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

# PENGERTIAN ICT<sup>2</sup>



# JARINGAN / KONEKSI INTERNET



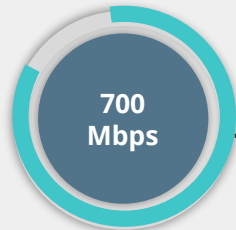
**Bandwith 300 Mbps  
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps  
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



## PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



## ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



## IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

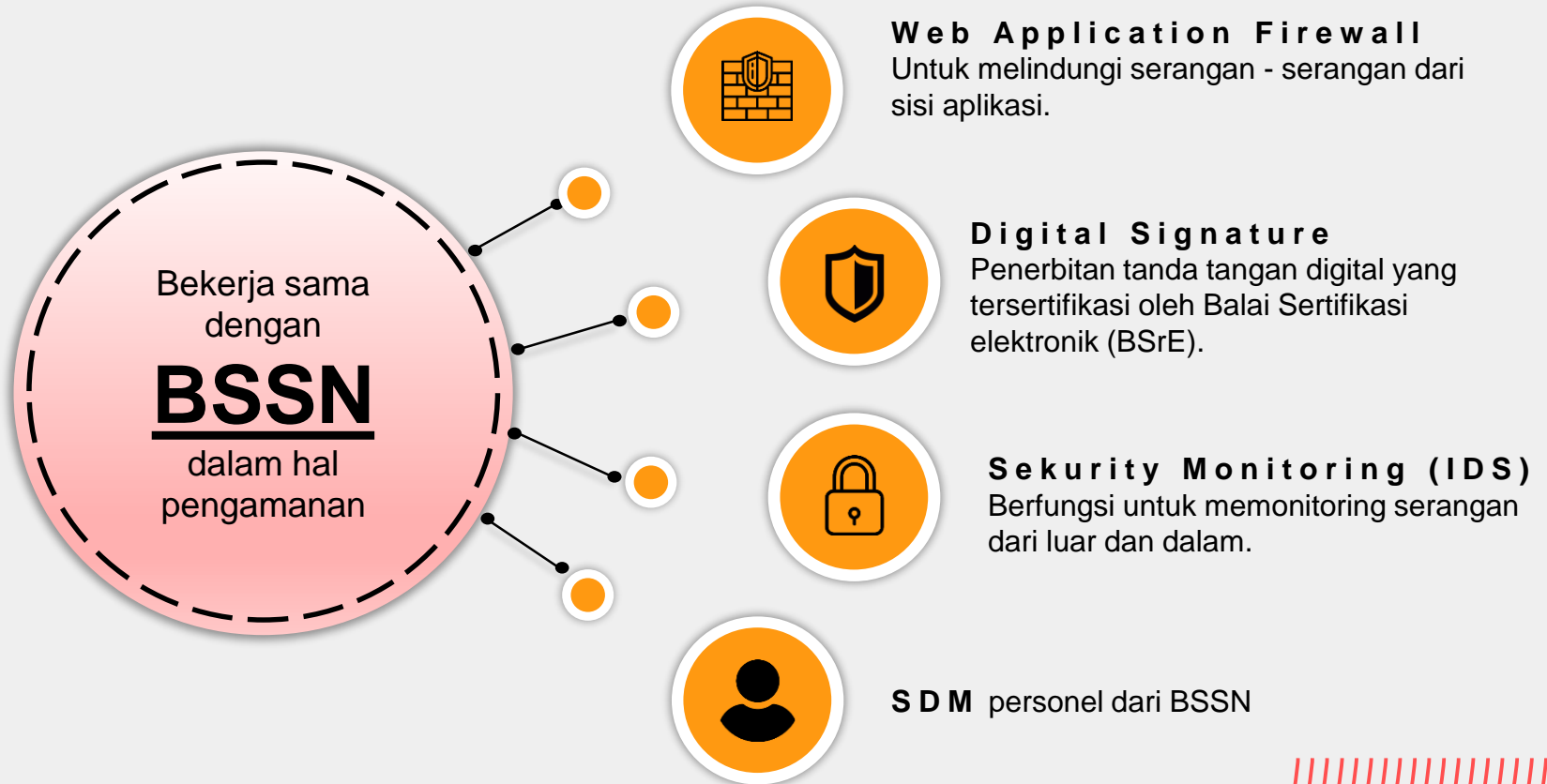


## MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



# SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI





## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

#### RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



## PERSIDANGAN ONLINE

### PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

#### TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

#### KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK:**

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

#### **SAKSI DAN AHLI:**

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



## **PERSIDANGAN ONLINE**

### **PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh**

#### **ALAT BUKTI:**

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

#### **PERKEMBANGAN ICT:**

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

#### **LAIN-LAIN:**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



# PERSIDANGAN VIRTUAL



**You Tube**  
Diakses melalui  
Youtube Mahkamah  
Konstitusi

PERSIDANGAN  
YANG  
DITAYANGKAN  
LIVE STREAMING  
DI KANAL  
YOUTUBE DAN  
WEBSITE MK

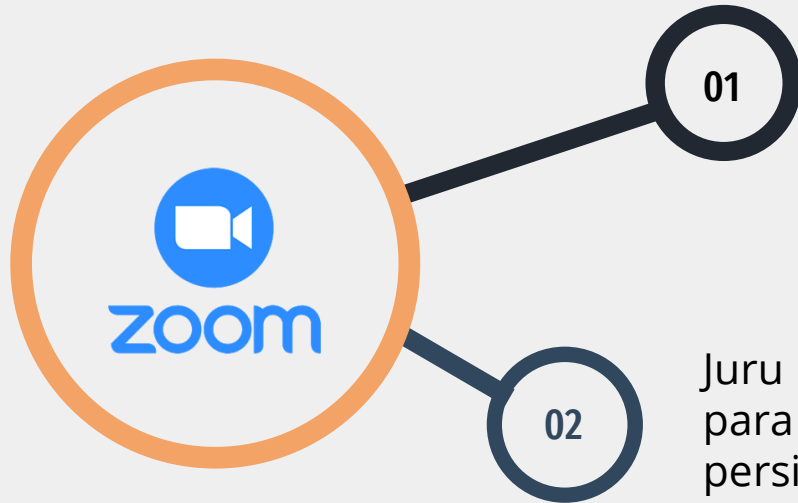
**MKRI.ID**  
Live Streaming  
Diakses melalui  
Website Mahkamah  
Konstitusi



## PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



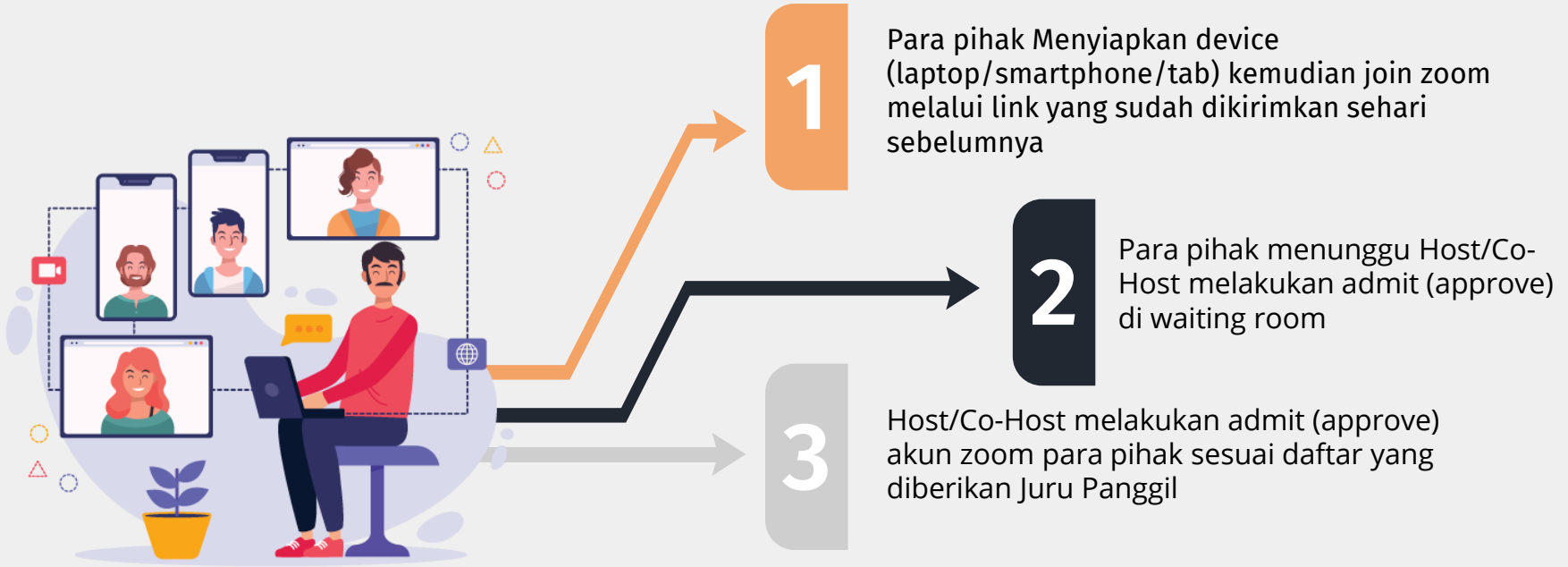
### TAHAP PERSIAPAN



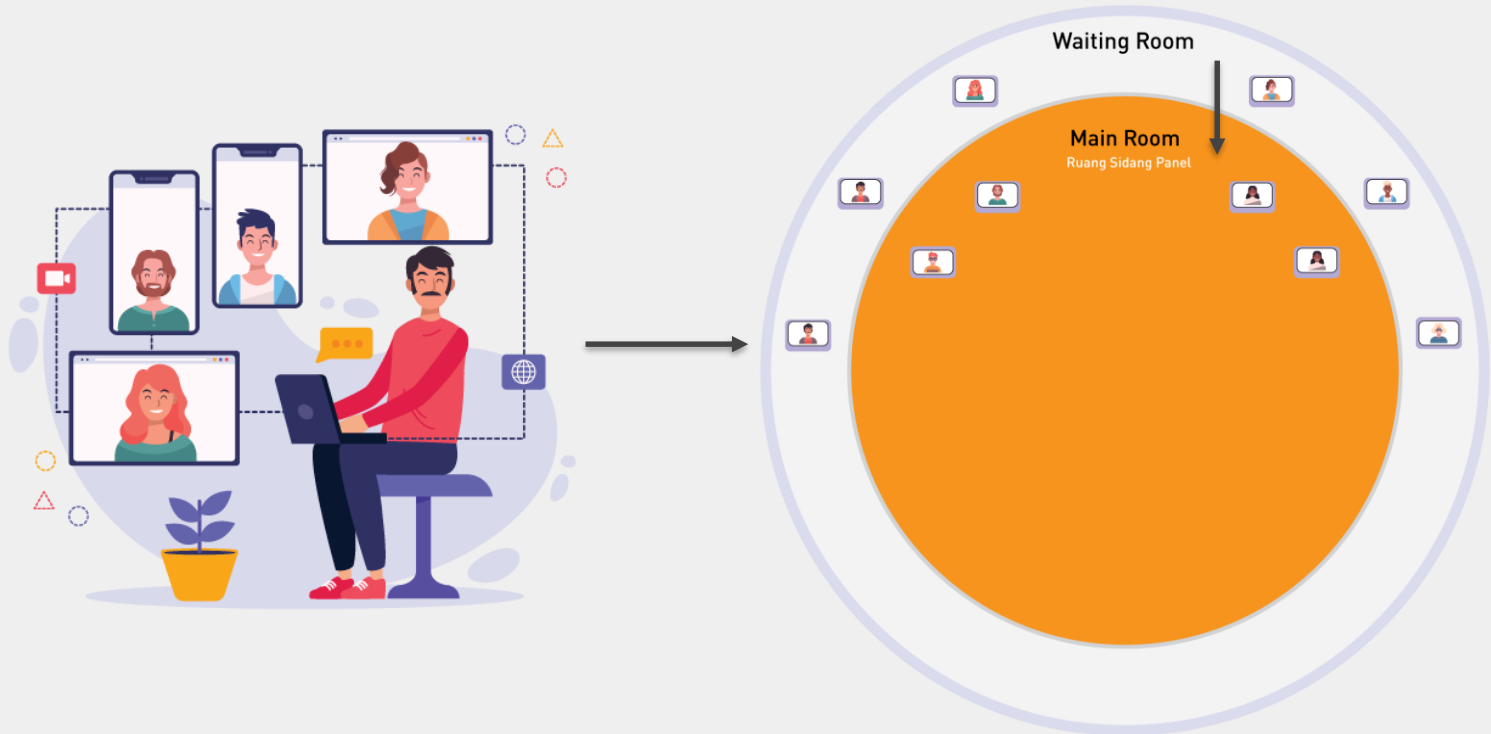
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

# ALUR PERSIDANGAN DARING

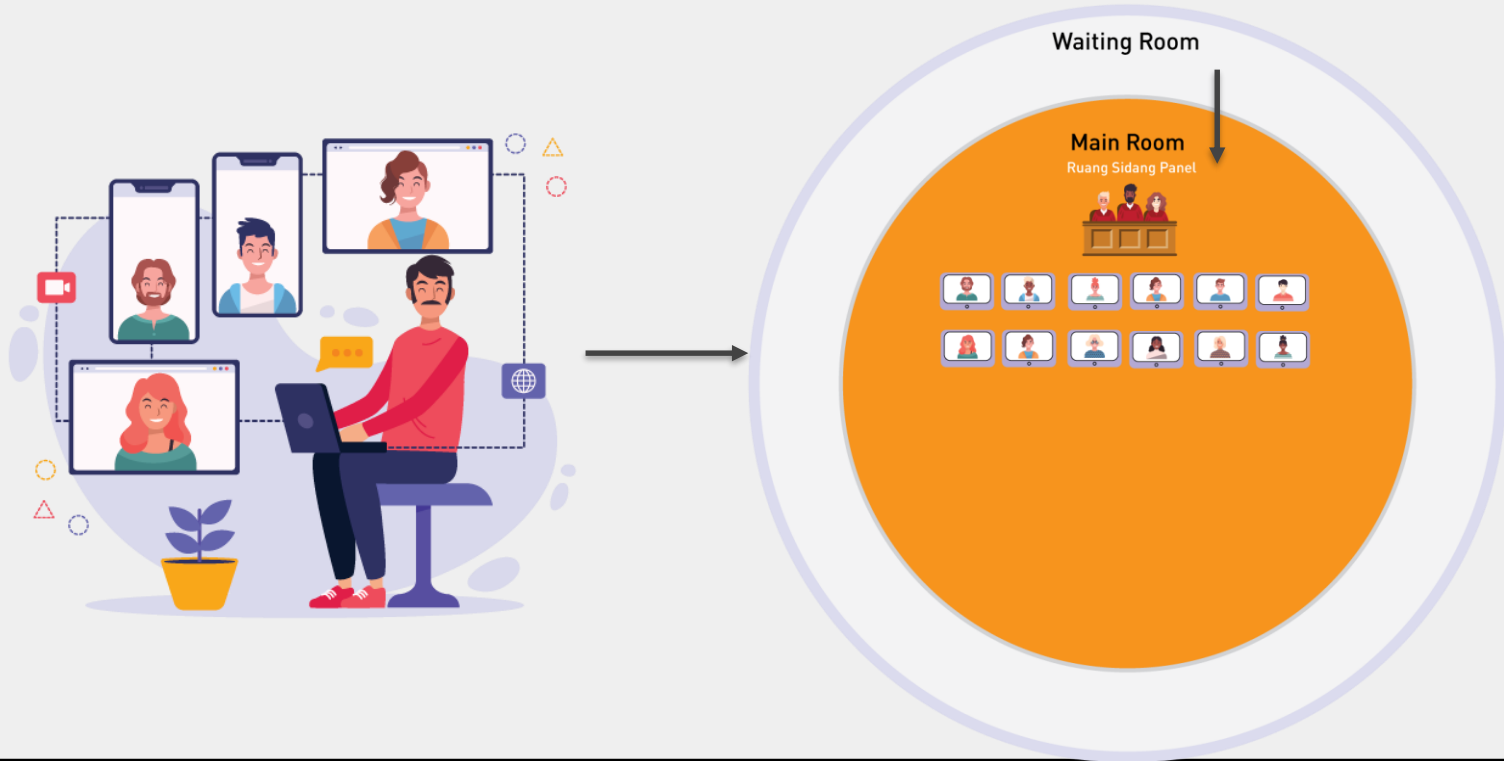


- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**





Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



# SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3  
Windows Slot-in PC for  
ViewBoard®

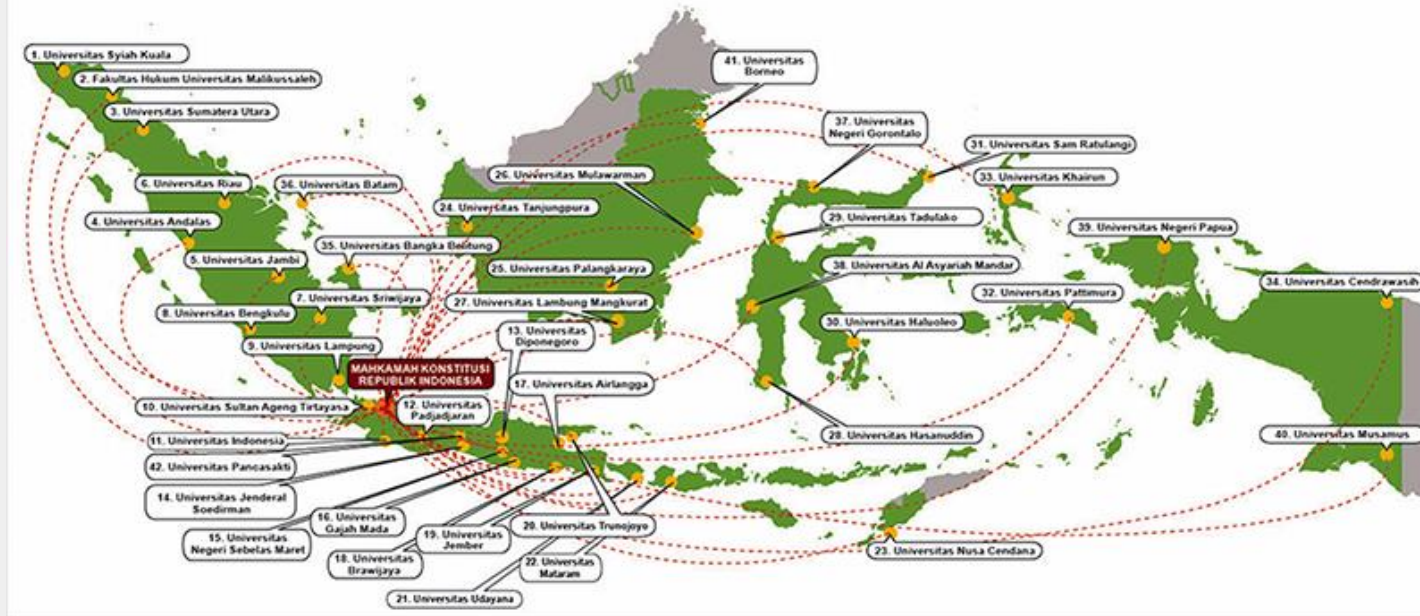


VB-STND-001  
Rolling Trolley Cart Stand for  
ViewSonic ViewBoard®



# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 66 LOKASI

## LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT	WILAYAH
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur	Jawa
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	Sumatera
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sumatera
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center	Sumatera
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun Bengkulu 38371 A	Sumatera
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123	Kalimantan
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 6514 Jawa Timur	Jawa
8	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	KTI
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214	Jawa
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta	Jawa
11	Fakultas Hukum Universitas Halu oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232	KTI
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245 Sulawesi Selatan	KTI
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	Jabodetabek
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat- Jambi, 36361	Sumatera
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9, Jember 68121 Jawa Timur	Jawa
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR.Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122	Jawa
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719	KTI
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H.Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan	Kalimantan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, BandarLampung 35145	Sumatera
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh	Sumatera
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat	KTI
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	Kalimantan

23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611	KTI
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo	KTI
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang, Nusa Tenggara Timur	KTI
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363	Jawa
27	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	Kalimantan
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal	Jawa
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	KTI
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	Sumatera
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura	KTI
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126	Jawa
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Besar Palembang	Sumatera
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)	Jawa
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	Sumatera
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	Sumatera
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118	KTI
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)	Kalimantan
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura	Jawa
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali	KTI
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315	KTI
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314	KTI
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar	KTI
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118	Jawa

45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211	KTI
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584	Jawa
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711	Jawa
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231	KTI
49	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511	KTI
50	Universitas Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144	Jawa
51	Desa Pasir Laweh	Jl. Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
52	Desa Galesong	Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92255	Sulawesi Selatan
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali	Bali
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.	Jawa
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB	NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh	Sumatera
57	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur	Jawa
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara	Sumatera
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225	Jawa
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan	Kalimantan
61	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua	Papua Barat
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Kalimantan
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat	Sumatera
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggra Timur	KTI
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan	Jawa

# PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



**Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja**



# PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan  
Symposium Nasional / International





# PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76<sup>TH</sup> INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MENGAWAL KONSTITUSI NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views • 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor 1:25:45

Sidang Penguapan Putusan 3:08:10

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

QR Code

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN871Avqkl5LFgxxw/editing/images num : Dr. Suhartoyo., Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

# PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)**

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

## **PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)**

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



# PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
***“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”***

## **Pasal 9 Ayat (1):**

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

## **Pasal 11 Ayat (1):**

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

## **Pasal 12 Ayat (1):**

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



# SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

## **PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)**

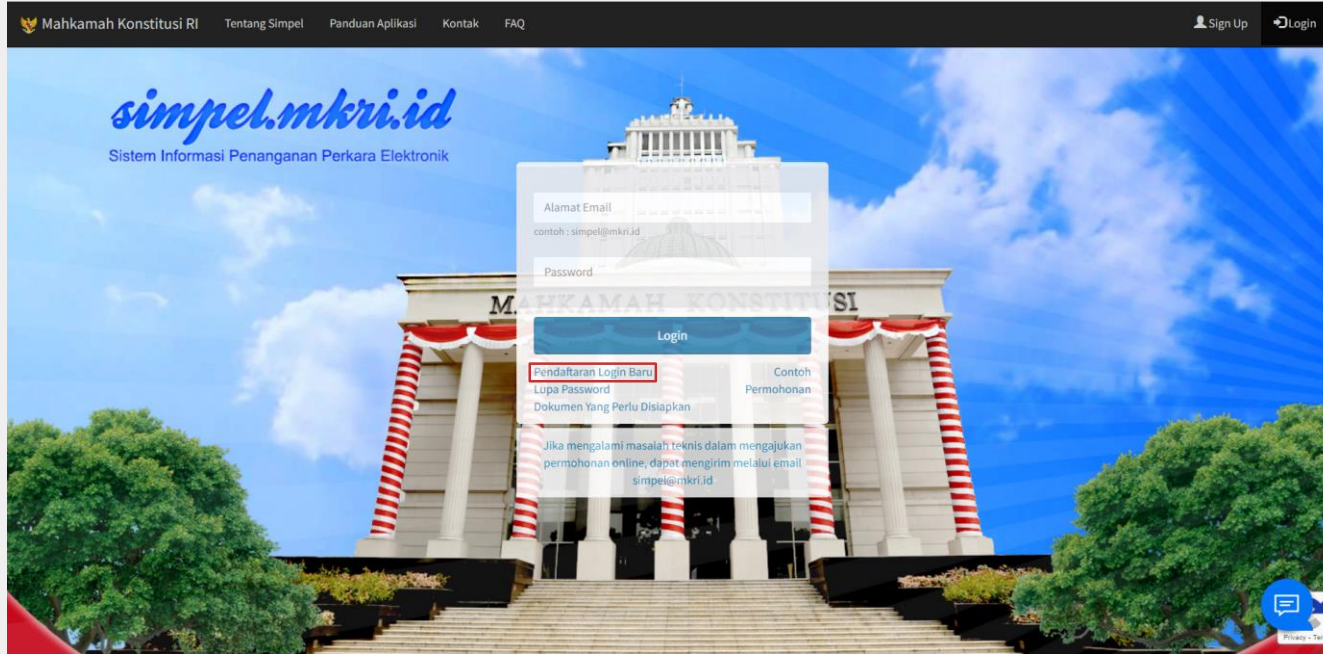
*"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"*

## **Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online**



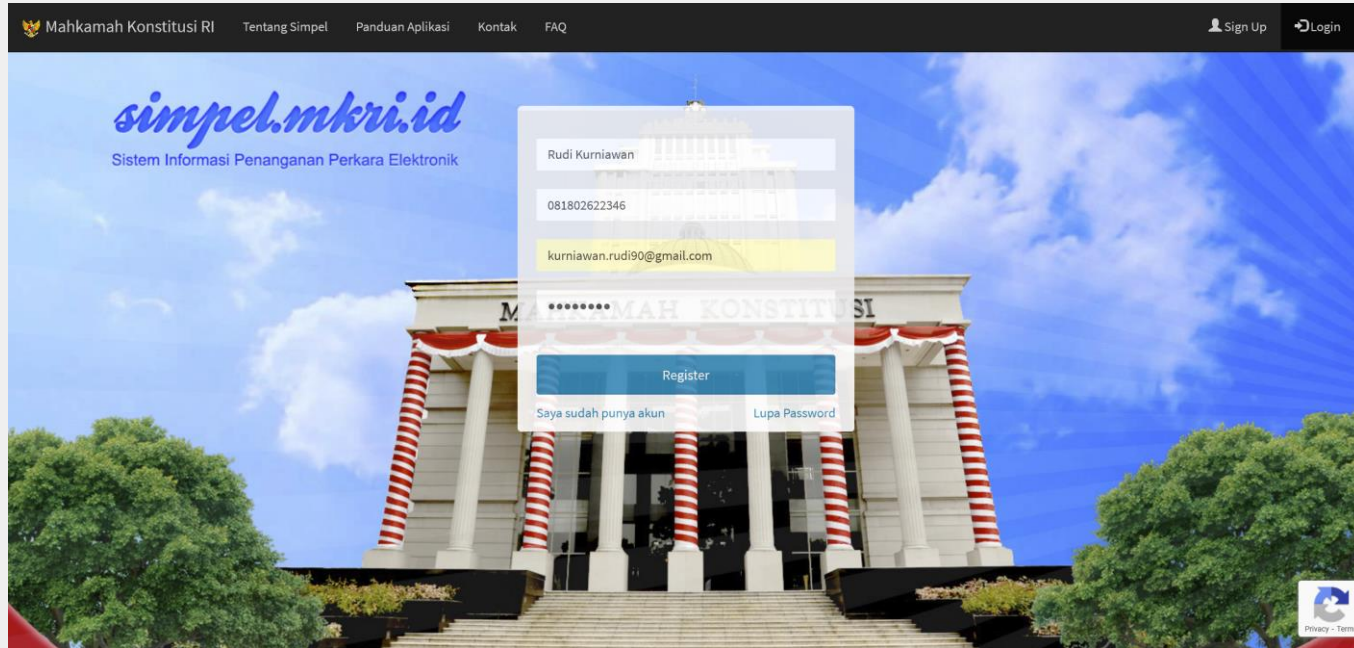
Permohonan Online ([simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id)) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id), maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



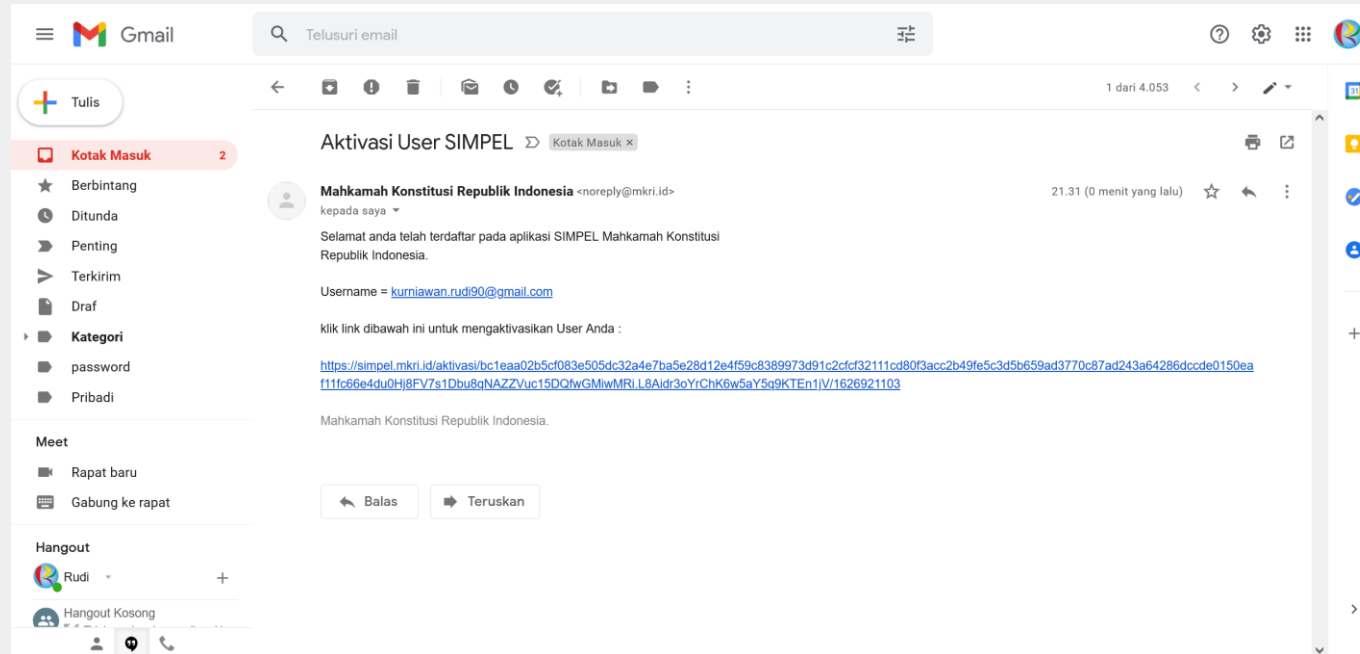
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"  
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.



# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL user interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area displays the 'Profile User' form with the following fields:

- Nama \***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP \***: 081802622346
- Nomor KTP \***: 1234567891011121
- File KTP \***: ttd digital.png (with a note: File type harus .jpg, .gif atau .png. Belum ada file KTP)
- Alamat**: Depok

At the bottom of the form are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



**SIMPEL**

Rudi Kurniawan  
Online

SIMPEL.MKRI.ID SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pengujian Undang-Undang (PUU) [Selengkapnya](#)
- 0 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD) [Selengkapnya](#)

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota [Selengkapnya](#)

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
26	28	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Legenda: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Libur (Red)

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

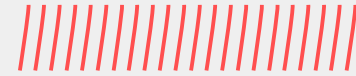


The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkara Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" (Online Request) for "PUU (Pengujian Undang-Undang)" (Constitutional Review). The interface is divided into three main process steps: "Proses Pengisian Pokok Permohonan" (Main Request Filing), "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa" (Applicant and Power of Attorney Data Filing), and "Proses Upload Dokumen" (Document Upload). The current step is "Permohonan \*", which includes a text area for the "Uraian Pokok Permohonan" (Main Request Description) with an example: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below this is a list of required documents: KTP Pemohon (applicant ID card), Email Pemohon, KTP Kuasa (power of attorney ID card), Email Kuasa, Surat Kuasa (power of attorney letter), File KTA/BAS (for lawyers), Permohonan (request form), Permohonan (request document), Daftar alat bukti (list of evidence), and Alat/dokumen bukti (evidence/document). A "Keterangan:" (Notes) section states: "\*\* Jika menggunakan kuasa pemohon" (If using applicant's power of attorney). At the bottom, there are "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save) buttons.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > > Permohonan PUU

**SIMPEL**

Rudi Kurniawan  
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

**Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)**

**Edit** Pokok permohonan :  
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang .....

**Data Pemohon** [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

**Data Kuasa** [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	<a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a>

[✖ Batal \(Hapus Permohonan\)](#) [📁 Simpan Sementara](#) [✅ Lanjutkan Upload Dokumen](#)

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) interface. The user is Rudi Kurniawan, logged in as 'Online'. The main menu on the left includes Dashboard, PENGAJUAN PERMOHONAN (with sub-items PUU, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah), INFORMASI (with sub-items Kunjungan Sidang, Bantuan, Konsultasi), and the current date/time: Kamis, 22 Juli 2021, 21:40:58.

The main content area is titled 'Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)'. It shows a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Proses Upload Dokumen' stage is active.

Below the progress bar is a section titled 'Berkas Permohonan' (Application Documents). It contains a table with the following data:

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table is a '+ Tambah Berkas' button. Below the table are four action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)' (blue), 'Batal (Hapus Permohonan)' (red), 'Simpan Sementara' (grey), and 'Kirim Permohonan' (green).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

# Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

### TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020  
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.  
Kuasa Pemohon : -  
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

# WEBSITE MK (MKRI.ID)



# MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB  
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB  
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022  
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**  
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MEMERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
Digital Signature  
no:118768196420114103355

**MAKLUMAT PELAYANAN  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2020  
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming





# PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



## LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

### MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018  
SEKRETERARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal  
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001  
Digital Signature  
no-118768196420114103355

### MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2020  
SEKRETERARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
M. GUNTUR HAMZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan  
Online  
simpl.mkri.id

PIPKADA SERENTAK  
2020

PENGUJIAN  
UNDANG - UNDANG



# JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (L)



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

**Permohonan Online**  
simpler.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



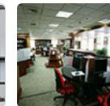
LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!



# BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (L)



simpel.mkri.id

## BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

## PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penyelurusan Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



# PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keduanya Tunda Libur

 **Agenda Sidang**

 **Siaran Pers**

 **Berlangganan**

 **ILM**

 **Konsultasi**

 **Dewan Etik**

**Permohonan Online**  
simpler.mkri.id



simpler.mkri.id


**BERITA** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan


**PILKADA SERENTAK 2020** **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**


 **Hakim Konstitusi**


 **Putusan**


 **Streaming dan Video Conference**


 **Case Tracking**


 **Informasi Anggaran**


 **AACC**


 **LPSE MKRI**


 **JDIH**


 **Pusdik MKRI**


 **Perpustakaan**


 **Pusat Sejarah Konstitusi**

 **Gedung MK**

 **Majalah Konstitusi**

 **Jurnal Konstitusi**

 **Jurnal Consrev**

 **SP4N-LAPOR!**



# MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (Light Blue)

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

**Permohonan Online**  
simpler.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

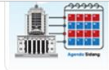
Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penyelurusan Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



# LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



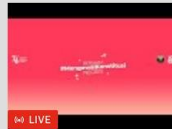
Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

## Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin,...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin,...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Senin,...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...



**2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110  
Fax: 021-3520177. Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



# CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (L)

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

### Permohonan Online

simpel.mkri.id

**BERITA** | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB  
**Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT**  
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB  
**MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB  
**Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN**  
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

**PILKADA SERENTAK 2020** | **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penyelurusan Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



# CASE TRACKING



MAHKAMAH  
KONSTITUSI

Q Cari

## CASE TRACKING

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

### Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

### Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHR:GUB

### Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

### Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

### Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

### Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.  
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022



# CASE TRACKING

Traking Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Dashboard | Charts & graphs

**Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan**

Tracking Perkara
Tracking Perkara

Timeline milestones:

- 05-01-2022: Pengajuan permohonan
- 11-01-2022: Pemeriksaan Kelengkapan
- 17-01-2022: Perbaikan permohonan
- 24-01-2022: RAGPRAK
- 27-01-2022: Pemeriksaan Persetujuan
- 22-02-2022: Pemeriksaan Putusan
- 07-03-2022: Perbaikan Putusan
- 16-03-2022: Perintah untuk Jarak (mendatangi)
- EPH
- 24-03-2022: Sidang Pengucapan Putusan
- 29-09-2022: Pengucapan Putusan

**Detail Proses dan Dokumen**

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	05-01-2022	Pengajuan permohonan disertai Penerbitan APD dan DKPP dengan Nomor 3/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	Pemohonan APD dan DKPP
2	11-01-2022	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Pemohonan	
3	07-03-2022	Penyerahan Perbaikan Pemohonan	Perbaikan Pemohonan
4	26-01-2022	Pemohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 12/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ASRPK dengan Nomor 12/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	ASRPK
5	27-01-2022	Telah diterbitkan surat penyampaian salinan pemohonan dengan nomor 13.12/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	
6	22-02-2022 14:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang - Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
7	07-03-2022 14:30 WIB	Agenda Sidang : Perbaikan Pemohonan Acara Sidang - Perbaikan Pemohonan (II)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	07-03-2022 09:30 WIB	Rapat Pemusyawaratan Hakim	-
10	29-03-2022 09:30 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang File Putusan
11	29-09-2022	Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 37.12/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	1. Penyampaian Salinan Putusan ke Pemohon 2. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Penyampaian Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia 4. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 5. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI 6. Penyampaian Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI

**Detail Perkara**

No. Perkara : 12/PUU-XX/2022  
 Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan  
 Pemohon : dr. Ludjiono  
 Kuasa Hukum : -

**Riwayat Sidang**

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	HASILKAN SIDANG	
			PDF	AUDIO
1	2022-02-09 11:13:00	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PDF	AUDIO
2	2022-02-22 14:00:00	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)	PDF	AUDIO
3	2022-03-07 15:18:00	Perbaikan Pemohonan (III)	PDF	AUDIO
4	2022-03-29 09:52:00	PENGUCAPAN PUTUSAN	PDF	AUDIO

**Pengujian Undang-Undang yang sempu**

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PENGUJI	TRACKING
				PERKORON
1	4/PUU-XX/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Berwika Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V)	Tracking
2	66/PUU-XX/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tandasa	Tracking
3	98/PUU-XX/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tandasa; Rasminto; Dhisly; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Soeklin; Rizki Apriadi; Syarif Muhammad Nur; Balan Eksakul Mahasriwa Universitas Esa Unggul (BEM UEG) dwaliq Romo Ili; Twinkla Hendrik Satrio; Ai Rahmawati; Bidad Eksakul Mahasriwa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEG) dwaliq Muhammad Zaky Rabbani; Rizaldi Prabowo; Ryan Pratna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dwaliq Muhammad Farhan Ali; David Wilton Purba; Ciptika Salsaha; Heni Noviana; Bidad Eksakul Mahasriwa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEM FH USAHE) dwaliq oley Deva Liana dan Marsha Inggita Livia Wahyu Nugroho; S.H.E.M.H.; Ancha Alwisa Sutadi; Donald Rochard Taraban; Antri Dhanes; Saad Mawardi; Saawan; Sidiqul Han Kawanu	Tracking

# CLICK MK



# CLICK MK



# CLICK MK



**TERIMA KASIH**

